



Kecamatan Pondokmelati



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
KECAMATAN PONDOKMELATI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKIP) TAHUN 2024**

*Jl. Pasar Kecapi, Perum Chandra Indah RT. 11 RW. 016  
Tlp. 021-8489744, Kelurahan Jatirahayu - Kecamatan Pondokmelati  
Kota Bekasi*



[kec.pomel@yahoo.com](mailto:kec.pomel@yahoo.com)



[www.kec.pondokmelati.bekasikota.go.id](http://www.kec.pondokmelati.bekasikota.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas Limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Pondokmelati dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi di setiap aspek pemerintahan, sesuai dengan amanat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Pondokmelati selama periode 2024, berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menguraikan perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil evaluasi kinerja serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Penyusunan LKIP ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara berbagai pihak, baik di tingkat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pegawai Kecamatan Pondokmelati, para pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah ini.

Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Untuk itu, kami membuka diri terhadap masukan, kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja pemerintahan di Kecamatan Pondokmelati.

Harapan kami, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga dapat menjadi alat evaluasi, monitoring dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Bekasi, Januari 2025  
Camat Pondokmelati,



Hervanto, A.P., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750717 199603 1 003



**LKIP**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	iii	
Daftar Tabel .....	iv	
Bab 1	Pendahuluan..... 1	
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi Kecamatan Pondokmelati Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019.....	2	
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	5	
1.3.1 Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati	7	
Bab 2	Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja .....	9
A. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Pondokmelati .....	9	
B. Perjanjian Kinerja .....	10	
Bab 3	Akuntabilitas Kinerja .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14	
I. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	15	
B. Akuntabilitas Keuangan .....	29	
Bab 4	Penutup .....	34
A. Kesimpulan .....	34	
B. Rencana Tindak .....	35	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi	3
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Berdasarkan Golongan/Pangkat	4
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Depok Berdasarkan Esselonering/Fungsional	4
Tabel 1.4	Kondisi Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Depok Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024-2026	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024	8
Tabel 2.3	Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024	8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Progran dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi	10
Tabel 3.1	Data Capaian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024 ....	12
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024	14
Tabel 3.3	Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024	14
Tabel 3.4	Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target RPD Kota Bekasi	15
Tabel 3.5	Data Anggaran Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	16
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	18
Tabel 3.7	Data Capaian Kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022-2024	18
Tabel 3.8	Data Capaian Kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan Target RPD	18
Tabel 3.9	Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	20
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat Tahun 2024	21
Tabel 3.11	Kertas Kerja Zona Tertib K3 Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024	22
Tabel 3.12	Data Capaian Kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022-2024	23



# LKIP

Tabel 3.13	Data Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib Tahun 2024 dengan Target RPJMD	25
Tabel 3.14	Data Anggaran Sasaran Strategis Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	25
Tabel 3.15	Data Realisasi Anggaran Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024	26



# Bab I

## Perencanaann Dan Perjanjian Kinerja



### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis 1 dan Sasaran Strategis 5 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja,



**LKIP**

sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi Kecamatan Pondokmelati Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019**

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selanjutnya pada Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) menguraikan fungsi Kecamatan Pondokmelati :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;



**LKIP**

12. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Kecamatan Pondokmelati:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas
  1. Sub Bagian Keuangan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi, terdiri atas :
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Kelurahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pondokmelati didukung oleh 142 orang Pegawai terdiri atas 45 orang Pegawai Negeri Sipil dan 97 Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun komposisi Pegawai ditunjukkan dalam table berikut :

**Tabel 1.1  
Data Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	9
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Lurah	3	1	4
4	Kasie Kecamatan	4	1	5
5	Sekretaris Kelurahan	3	1	4
6	Kasubag Tata Usaha	1	-	1
7	Kasubag Keuangan	1	-	1
8	Kasi Kelurahan	12	-	12
9	Pelaksana Kecamatan Dan Kelurahan (PNS)	10	6	16
10	Tenaga Kontrak Kerja	64	33	97
	<b>TOTAL</b>			<b>142</b>

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024, diolah

**Tabel 1.2  
Kondisi Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi  
Berdasarkan Golongan/Pangkat**



**LKIP**

NO	Pangkat	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	9
1	Golongan IV	3	-	3
2	Golongan III	27	5	32
3	Golongan II	6	3	9
	<b>Total</b>			<b>44</b>

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024, diolah

**Tabel 1. 3**  
**Kondisi Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Depok**  
**Berdasarkan Esselonering/Fungsional**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	9
1	Esselon II	-	-	-
2	Esselon III	2		2
3	Esselon IV	23	2	25
4	Jabatan Fungsional	10	6	16
5	Jabatan Pelaksana	64	33	97
	<b>TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>41</b>	<b>140</b>

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024, diolah

**Tabel 1. 4**  
**Kondisi Pegawai Kecamatan Pondokmelati Kota Depok**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	9
1	SD	-	-	-
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	5	2	7
4	D-I	-	-	-
5	D-II	-	-	-
6	D-III	1	2	3
7	D-IV	-	-	-
8	S-I	23	2	25
9	S-2	5	1	6
10	S- 3	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>43</b>

Sumber:Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024, diolah

Dari empat tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Kecamatan terdiri dari 99 orang laki-laki dan 41 orang perempuan, dengan total keseluruhan 140 pegawai. Pekerjaan yang terlibat di antaranya adalah Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kasie Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kasubag Tata Usaha dan Keuangan, Kasi Kelurahan, Pelaksana Kecamatan dan Kelurahan (PNS), serta Tenaga Kontrak Kerja.



**LKIP**

Sejumlah posisi, seperti Kasi Kelurahan dan Tenaga Kontrak Kerja, didominasi oleh pegawai laki-laki, sementara posisi lainnya lebih berimbang atau memiliki jumlah perempuan yang lebih sedikit.

### **1.3 Aspek Strategis Organisasi**

Kecamatan Pondokmelati merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak dipusat Pemerintahan kota Bekasi, yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Letak Kecamatan Pondokmelati sangat strategis, dilihat dari aspek geografis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Pondokgede.

Sebelah Selatan : Kecamatan Jatisampurna.

Sebelah Timur : Kecamatan Jati Asih.

Sebelah Barat : Kecamatan DKI Jakarta.

Keadaan topografi Kecamatan Pondokmelati merupakan daerah dataran rendah, sehingga menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat.

Luas wilayah Kecamatan Pondokmelati adalah 1.179.925 Ha yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu :

- Kelurahan Jatirahayu : 312,425 Ha
- Kelurahan Jatiwarna : 248,000 Ha
- Kelurahan Jatimelati : 316,000 Ha
- Kelurahan Jatimurni : 300,500 Ha

Kecamatan Pondokmelati terdiri dari 57 RW dan 388 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan / penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Pondokmelati yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu



**LKIP**

meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketertarikan Ketertiban dan Keamanan dan berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi. Kecamatan Pondokmelati sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki berbagai kegiatan dan layanan yang meliputi aspek administratif, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa kegiatan dan layanan yang biasanya tersedia:

**1. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan**

- Perbaikan jalan lingkungan dan drainase;
- Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum (taman, posyandu, tempat ibadah) Program penghijauan dan kebersihan lingkungan

**2. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

- Pembinaan UMKM;
- Pelatihan kerja dan wirausaha;
- Program PKK dan Posyandu.

**3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

- Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketertiban;
- Penanganan konflik sosial dan mediasi warga;
- Pembinaan Linmas dan FKPM.

Kecamatan Pondokmelati Juga mempunyai inovasi Pomel Beraksi (Pondokmelati Berbagi Amanah Kegiatan Sosial), Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan



**LKIP**

mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

### **1.3.1 Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati**

Dengan memperhatikan situasi lingkungan strategi nasional, daerah, serta internal, terdapat 3 (tiga) isu strategis pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pondokmelati .

#### **1. Terbitnya Peraturan Pusat**

Perubahan mendasar yang mempengaruhi penyusunan perencanaan daerah adalah terbitnya beberapa peraturan yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; dan
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran Dengan adanya kebijakan promosi, rotasi dan



**LKIP**

mutasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, hal tersebut berakibat pada adanya ritme kebijakan pimpinan Kepala Perangkat Daerah.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Modernisasi sarana dan prasarana perkantoran di Perangkat Daerah juga perlu diprioritaskan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik mendatang. Sebagian besar sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah kurang representatif dan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan publik dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil survei, kecepatan pelayanan menjadi persoalan utama yang dikeluhkan publik. Sementara dari sisi aparatur, selain kualitas sarana/prasarana, kualitas jaringan telekomunikasi masih menjadi persoalan. Hal ini perlu diperbaiki untuk mendukung pola kerja baru aparatur.



## **Bab II**

### **Perencanaann Dan Perjanjian Kinerja**

**BAB 2  
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. Tujuan dan Sasaran Kecamatan**

Secara umum, peran Kecamatan Banjarsari sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Bekasi adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Secara spesifik, peran Kecamatan Pondokmelati terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati.
4. Mewujudkan Kecamatan Pondokmelati Yang Tertib dan Aman.

Sedangkan Kecamatan Pondokmelati mendukung 3 sasaran strategis pembangunan daerah Kota Bekasi yang dijabarkan, diantaranya:

**Tabel 2.1  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokmelati  
Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati		1. Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Nilai	10	10	10
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	81	81	81,50
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	1.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75	75,25	75,50
2	Mewujudkan Kecamatan Pondokmelati Yang Tertib dan Aman		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	60%	60%	60%
		1.1 Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	2.1.1 Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	Persen	60%	60%	60%

Sumber Renstra Kecamatan Pondokmelati 2024-2026

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Pondokmelati Kota Bekasi untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati**  
**Kota Bekasi Tahun 2024**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1		2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	81
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	Persen	60

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024

### B.1 Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Strategi, Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokmelati**  
**Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	2	3
I	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati</b>	<p><b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b></p> <p><b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b></p> <p>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p> <p><b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b></p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</p>

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
II	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Praasarana Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	
			<b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan</b>
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
III	<b>Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	
			<b>Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 25.730.352.360,00 yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2024**  
**Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi**

No	Nama Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	8
	<b>Kecamatan Pondokmelati</b>		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.613.917.960,00	Sekretariat
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 210.000.000,00	Pem/EkBang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 390.000.000,00	Permas
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 365.000.000,00	Trantib/Kesos
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 80.000.000,00	Trantib
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 17.658.917.960,00</b>	
	<b>Kelurahan Jatirahayu</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 50.000.000,00	

<b>No</b>	<b>Nama Program/Sub Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 2.812.569.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.862.569.000,00</b>	
	<b>Kelurahan Jatiwarna</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 120.000.000,00	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.628.360.800,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.748.360.800,00</b>	
	<b>Kelurahan Jatimelati</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 50.000.000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.741.740.800,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.791.740.800,00</b>	
	<b>Kelurahan Jatimurni</b>		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 35.000.000,00	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.633.763.800,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.668.763.800,00</b>	
	<b>Total</b>	<b>Rp. 25.142.352.360,00</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024



# **Bab III** **Akuntabilitas** **Kinerja**

**BAB 3****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Data Capaian Kinerja Kecamatan Pondokmelati**  
**Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	81	84,94	104,87%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75	75,14	100,19 %
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	Persen	60	60	100%

*Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2024, diolah*

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Penjelasan dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



**LKIP** Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja 104,87%.

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian kinerja 100,19%

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib, Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati dengan capaian kinerja 100%.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

#### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati**

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada Tujuan 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati. Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik



**LKIP**

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut :

**I. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur kepuasan masyarakat sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Melalui program ini Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat meningkat. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik selama 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	81	84,94	104,87%

Penjelasan Tabel diatas, kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 81 nilai dan dapat direalisasikan sebesar 84,94 nilai, sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 104,87% melebihi target. Mempedomani Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.4/Kep.78-Setda.Org/XII/2024 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, Perhitungan Nilai IKM Kecamatan Pondokmelati adalah sebagai berikut:

Pembobotan Semester & Triwulan: Semester 1 dianggap sebagai setengah tahun, sedangkan Triwulan 3 & 4 mencerminkan semester 2. Jika

menggunakan rata-rata berbobot formulanya seperti dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 IKMTahunan &= (IKM Semester 1 \times 2) + (IKM Triwulan 3) + (IKM Triwulan A)/4 \\
 &= (79,42 \times 2) + 89,72 + 91,19/4 \\
 &= 158,84 + 89,72 + 91,19 \\
 &= 339,75/4 \\
 &= \mathbf{84,94}
 \end{aligned}$$

**Tabel 3. 3**  
**Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	82	83.51	101,85%	83	95,17	114,66%	81	84,94	104,87%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 (104,87%) realisasi turun sebesar 9,79% dibandingkan dengan tahun 2023 (114,66%) dan sebesar 3,02% realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2022 (101,85).

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target RPD Kota Bekasi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	90,83	84,94	93,83 %

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam RPD 2024-2026 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 84,94 atau 93,83%. kondisi ini dapat

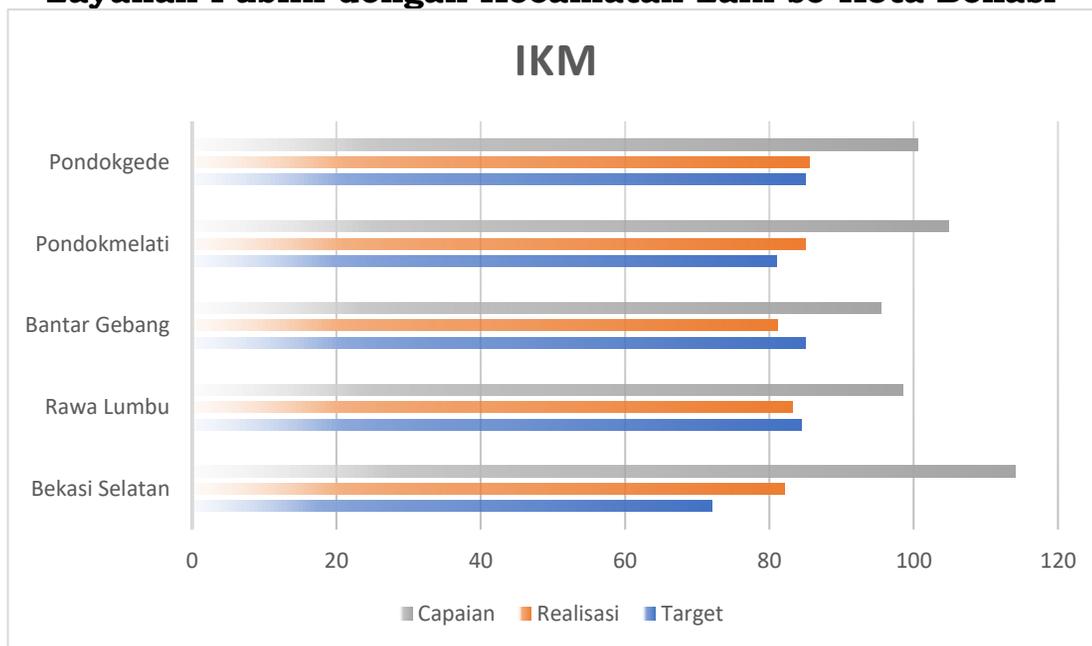


**LKIP**

dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

**Grafik 3.1**

**Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan Kecamatan Lain se-Kota Bekasi**



Sumber data: Dokumen pengukuran kinerja tahun 2024, diolah

**Tabel 3.5**

**Data Anggaran Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian	Efisiensi
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	465.000.000	421.132.500,00	43.867.500,00	90,57	
	<b>Jumlah</b>	<b>465.000.000</b>	<b>421.132.500,00</b>	<b>43.867.500,00</b>	<b>90,57</b>	

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 43.867.500,00 atau 90,57% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 465.000.000,- dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati dengan indikator Kinerja



**LKIP** Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik adalah sebagai berikut:

- Faktor Penghambat  
Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penyusunan perencanaan daerah. Keterbatasan sumber daya pegawai serta adanya efisiensi anggaran pada pertengahan tahun anggaran.
- Faktor Pendukung  
Sumber daya pegawai yang dapat diandalkan dan efektivitas anggaran yang ada.
- Rencana Aksi
  1. Menyiapkan sarana prasarana;
  2. Mengoptimalkan media sosial kecamatan.

## **2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati**

Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi, didukung oleh koordinasi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, serta perencanaan dan pengawasan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan lokal secara optimal.

Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakankebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada Tujuan 1 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati. Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).



**LKIP**

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut :

### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Melalui program-program ini Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi telah melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sehingga mendapat peningkatan hasil/kinerja.

#### Komponen Penilaian SAKIP Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,28
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,37
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,39
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75,14</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024, diolah

Capaian kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selama 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	BB	BB	
		Nilai	75	75,14	100,19%

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dapat tercapai Predikat BB atau 75 Nilai dan dapat direalisasikan dengan Predikat BB atau 75,14 nilai sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100,19% target tercapai.

**Tabel 3.7**  
**Data Capaian Kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	BB	BB		BB	BB		BB	BB	
		Nilai	76,50	75,09	98,09%	77	75,14	97,59%	75	75,14	100,19%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP pada tahun 2024 (75,14) mengalami peningkatan realisasi sebesar 2,67% dibandingkan dengan tahun 2023, dan mengalami peningkatan realisasi sebesar 2,15% dibandingkan dengan tahun 2022

**Tabel 3.8**  
**Data Capaian Kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan Target RPD**

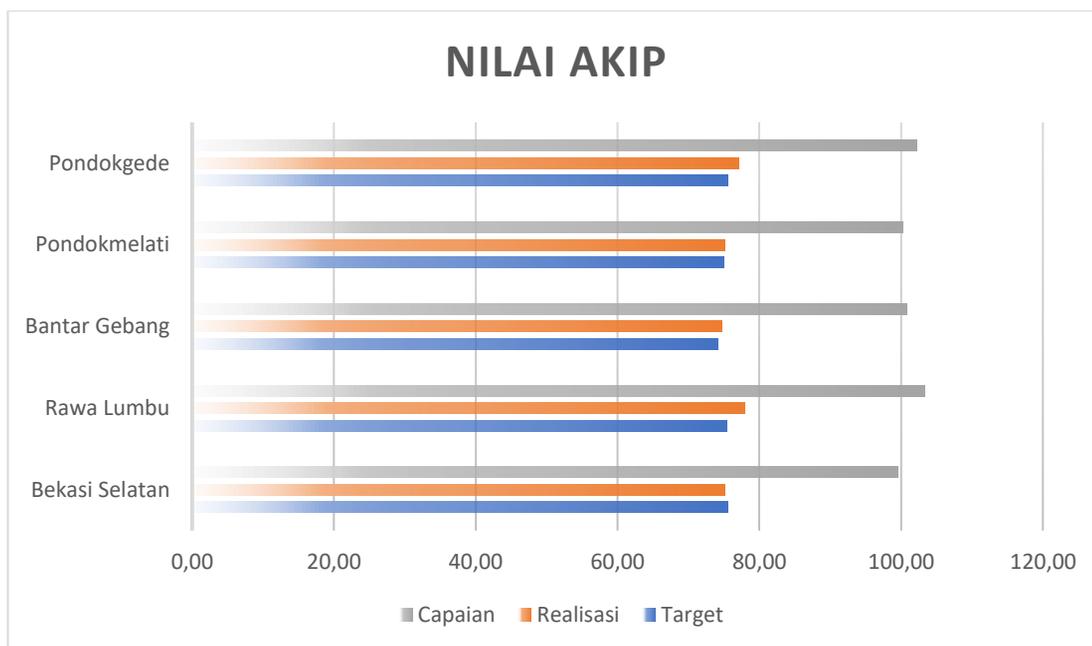
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	BB	BB	
		Nilai	79	75,14	95,12%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam RPD 2024-2026 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP Predikat BB atau 75,14 nilai dari target yang ditetapkan Predikat BB atau 79 nilai dengan capaian baru 95,12% kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan belum maksimal.



LKIP

**Grafik 3.2**  
**Data Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**  
**dengan Kecamatan Lain se-Kota Bekasi**



**Tabel 3. 9**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis**  
**Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.613.917.960	15.765.303.485	848.614.475,00	94,89	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.206.434.400	7.972.308.750	234.125.650	97,15	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.000.000	52.908.000	27.092.000	66,14	
	<b>Jumlah</b>	<b>24.900.352.360,00</b>	<b>23.790.520.235,00</b>	<b>875.706.475,00</b>	<b>95,54</b>	

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.23.790.520.235,00 atau 95,45% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.900.352.360,- dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan



**LKIP**

pelaporan kinerja pada perangkat daerah terdapat factor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, engumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah dengan indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP di Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Faktor Penghambat

Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penyusunan perencanaan daerah. Keterbatasan sumber daya pegawai serta adanya efisiensi anggaran pada pertengahan tahun anggaran.

- Faktor Pendukung

Sumber daya pegawai yang dapat diandalkan dan efektivitas anggaran yang ada.

- Rencana Aksi

Peningkatan kualitas dokumen, evaluasi indikator kinerja individu dan keselarasan dengan sasaran PD.

**Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat**

Pada tahun 2024, Kecamatan Pondokmelati menetapkan sasaran strategis 'Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat' sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi masyarakat. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama berupa persentase peningkatan wilayah yang tertib, dengan target capaian sebesar 60%. Dalam analisis berikut, akan dijelaskan realisasi capaian, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	%	60	60	100

Sumber : Hasil Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib adalah sebesar 65 % dari target sebesar 60 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian kinerja ini sesuai target yang diperjanjikan. Meskipun telah sesuai dengan target yang dicapai, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

Analisis pencapaian sasaran Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat adalah sebagai berikut :

### 1. Hasil Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib

Sasaran Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib yaitu dengan perhitungan :  $(\text{Jumlah Zona yang telah ditertibkan} / \text{Jumlah Zona Tertib}) \times 100 \%$ . Kecamatan Pondokmelati sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia sehingga menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah tertib K3. Pada tahun 2024, Kecamatan Pondokmelati juga berhasil meraih prestasi gemilang dengan meraih Juara 2 dalam Lomba Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) lingkungan Kantor

Kecamatan Pondokmelati tingkat Kota. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah kecamatan bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif warga, sinergi antara aparat kecamatan dan kelurahan, serta berbagai program inovatif seperti gerakan gotong royong mingguan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan penguatan kesadaran lingkungan. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Kecamatan Pondokmelati untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan Tahun 2024 adalah akhir periode Renstra Perubahan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi. Dibawa ini target 10 zona tertib K3, yaitu :

**Tabel 3.11**  
**Kertas Kerja Zona Tertib K3**  
**Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024**

No	Zona	2024	Ket
1	Kantor Kecamatan Pondokmelati	√	Baik
2	Kantor kel. Jtrahayu	√	Baik
3	Kantor kel. Jtwarna	√	Baik
4	Kantor kel. jt murni	√	Baik
5	Kantor kel. jtmelati	√	Baik
6	jl. KODAU Kelurahan Jatirahayu	√	Baik
7	lingkar tol JORR Kelurahan Jatiwarna-Jatimelati	√	Baik
8	Jl. Hankam	√	Baik
9	Jl. Kp. Sawah Kelurahan Jatimelati-Jatimurni	√	Baik
10	Jl. Pasar Kecapi Kelurahan Jatiwarna	√	Baik
	Jumlah Total Titik	10	
	Persentase	60%	

Sumber : Hasil Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kecamatan Pondokmelati telah berhasil menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebersihan, keindahan, dan ketertiban di 10 zona prioritas. Zona-zona tersebut mencakup Kantor Kecamatan Pondokmelati, seluruh kantor kelurahan (Jatirahayu, Jatiwarna, Jatimurni, dan Jatimelati), serta beberapa area strategis seperti Jalan

KODAU, Lingkar Tol JORR, Jalan Hankam, Jalan Kampung Sawah, dan Jalan Pasar Kecapi. Seluruh zona tersebut dinilai dalam kondisi baik berdasarkan penilaian rutin. Dengan jumlah total titik yang mencapai 10, Kecamatan Pondokmelati berhasil mencapai persentase capaian sebesar 60% dari target keseluruhan, mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman.

**Tabel 3.12**  
**Data Capaian Kinerja Hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022-2024**

No	Zona	2022	2023	2024	Ket
1	Kantor Kecamatan Pondokmelati	√	√	√	Baik
2	Kantor kel. Jtrahayu	√	√	√	Baik
3	Kantor kel. Jtwarna	√	√	√	Baik
4	Kantor kel. jt murni	√	√	√	Baik
5	Kantor kel. jtmelati	√	√	√	Baik
6	jl. KODAU Kelurahan Jatirahayu	√	√	√	Baik
7	lingkar tol JORR Kelurahan Jatiwarna-Jatimelati	√	√	√	Baik
8	Jl. Hankam	√	√	√	Baik
9	Jl. Kp. Sawah Kelurahan Jatimelati-Jatimurni	-	√	√	Baik
10	Jl. Pasar Kecapi Kelurahan Jatiwarna	-	√	√	Baik
	Jumlah Total Titik	8	10	10	
	<b>Persentase</b>	<b>60%</b>	<b>65%</b>	<b>60%</b>	

Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2024, Kecamatan Pondokmelati telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban pada zona prioritas yang telah ditentukan. Berikut adalah ringkasan perkembangannya:

- Tahun 2022:
  1. Sebanyak 8 zona tercatat dalam kondisi baik, mencakup kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan beberapa jalan strategis.
  2. Persentase capaian pada tahun ini mencapai 60%.



## LKIP Tahun 2023

1. Jumlah zona meningkat menjadi 10, dengan penambahan dua zona baru, yaitu Jalan Kampung Sawah dan Jalan Pasar Kecapi, yang berhasil dinilai dalam kondisi baik.
  2. Persentase capaian meningkat menjadi 65%, mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.
- Tahun 2024 :
    1. Zona prioritas tetap sebanyak 10 titik dengan kondisi yang konsisten baik.
    2. Namun, persentase capaian kembali menjadi 60%, mengindikasikan evaluasi lebih rinci diperlukan untuk memahami faktor yang memengaruhi perhitungan capaian.

Kesimpulan dari penelaahan tersebut adaah dari tahun 2022 hingga 2024, Kecamatan Pondokmelati telah berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas pada zona prioritas, dengan fokus utama pada kantor kecamatan, kelurahan, dan jalan strategis. Penambahan dua zona baru pada tahun 2023 menunjukkan komitmen untuk memperluas area yang dijaga ketertibannya. Namun, persentase capaian yang menurun dari 2023 ke 2024 memerlukan perhatian lebih untuk menjaga tren peningkatan di masa mendatang.

**Tabel 3.13**  
**Data Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib Tahun 2024 dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	%	2,69	60	

Pada tahun 2024, Kecamatan Pondokmelati berhasil mencapai realisasi 60% dalam indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib, jauh melampaui target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi yang hanya sebesar 2,69%. Capaian ini mencerminkan efektivitas program-program yang telah dijalankan, seperti gotong royong, pengawasan rutin, dan kolaborasi antara



**LKIP**

pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan tingginya kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban wilayah. Dengan hasil ini, Kecamatan Pondokmelati tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga menunjukkan potensi untuk terus meningkatkan kualitas ketertiban dan kebersihan di masa depan.

**Tabel 3.14**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis**  
**Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang**  
**didukung oleh kohesi sosial yang kuat**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian	Efisiensi
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	365.000.000	311.498.000		85,34	
	<b>Jumlah</b>	365.000.000	311.498.000		85,34	

Pada tahun 2024, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokmelati memiliki pagu anggaran sebesar Rp 365.000.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 311.498.000, yang menghasilkan selisih anggaran sebesar Rp 53.502.000. Capaian program ini adalah 85,34%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif efisien. Angka ini mengindikasikan bahwa anggaran yang tersedia telah dikelola dengan baik, meskipun ada selisih antara pagu anggaran dan realisasi yang dapat digunakan untuk pengalokasian atau perbaikan di tahun berikutnya. Efisiensi anggaran yang tinggi ini menunjukkan pengelolaan yang tepat dan optimal dalam mendukung tercapainya tujuan program ketentraman dan ketertiban umum.

Dibawah ini disajikan factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran, diantanya :

- Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondokmelati antara lain adalah terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam mengelola program-program

ketertiban, serta kurangnya fasilitas pendukung yang memadai untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang lebih luas dan menyeluruh juga menjadi kendala, mengingat ketergantungan pada dana yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran.

- **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan program ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan berbagai organisasi masyarakat turut mempercepat implementasi program. Selain itu, adanya teknologi yang dapat digunakan untuk pengawasan dan koordinasi lebih efektif menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan ketertiban berjalan dengan lancar.

- **Rencana Aksi**

Untuk mengatasi faktor penghambat, rencana aksi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pelatihan bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam program ketertiban, serta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya, dalam mendukung faktor pendukung, perlu dilakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, perlu dilakukan penataan anggaran yang lebih fleksibel agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan program.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



**LKIP**

**Tabel 3.15  
Data Realisasi Anggaran Kecamatan Pondokmelati  
Kota Bekasi Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.613.917.960,00</b>	<b>15.765.303.485,00</b>	<b>94,89</b>	<b>848.614.475,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.780.450.000,00</b>	<b>9.443.793.772,00</b>	<b>96,46</b>	<b>346.656.228,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.777.450.000,00	9.443.793.772,00	92,04	346.656.228,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>73.680.000,00</b>	<b>0</b>	<b>16.320.000,00</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	73.680.000,00	0	16.320.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>376.035.000,00</b>	<b>80,01</b>	<b>93.965.000,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	28.639.000,00	95,46	1.361.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	191.985.000,00	95,99	8.015.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	41.424.000,00	41,42	58.576.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	20.400.000,00	51,00	19.600.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	87.056.000,00	96,73	2.944.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	9.381.000,00	93,81	619.000,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>239.895.000,00</b>	<b>236.550.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>3.345.000,00</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.895.000,00	236.550.000,00	98,61	3.345.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.490.572.960,00</b>	<b>5.161.289.442,00</b>	<b>94,00</b>	<b>329.283.518,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	182.303.242,00	91,15	17.696.758,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.290.572.960,00	4.978.986.200,00	94,11	311.586.760,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>481.105.271,00</b>	<b>89,09</b>	<b>58.894.729,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	44.689.468,00	89,38	5.310.532,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	111.778.141,00	69,86	48.221.859,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	79.000.000	98,75	1.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	245.637.662,00	98,26	4.362.338,00
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>199.093.000,00</b>	<b>94,81</b>	<b>10.907.000,00</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>114.780.000,00</b>	<b>95,65</b>	<b>5.220.000,00</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120.000.000,00	114.780.000,00	95,65	5.220.000,00



**LKIP**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>84.313.000,00</b>	<b>93,68</b>	<b>5.687.000,00</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	90.000.000,00	84.313.000,00	93,68	5.687.000,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>228.922.000,00</b>	<b>58,7</b>	<b>161.078.000,00</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>179.560.000,00</b>	<b>57,92</b>	<b>130.440.000,00</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	54.780.000,00	54,78	45.220.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.000.000,00	124.780.000,00	77,99	35.220.000,00
Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	0	0	50.000.000,00
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>63.532.000,00</b>	<b>79,42</b>	<b>16.468.000,00</b>
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	80.000.000,00	63.532.000,00	79,42	16.468.000,00
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>365.000.000,00</b>	<b>311.498.000,00</b>	<b>85,34</b>	<b>53.502.000,00</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>365.000.000,00</b>	<b>311.498.000,00</b>	<b>85,34</b>	<b>53.502.000,00</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000.000,00	53.534.000,00	66,92	36.666.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	285.000.000,00	268.164.000,00	94,09	16.836.000,00
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>52.008.000,00</b>	<b>65,01</b>	<b>27.992.000,00</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>52.008.000,00</b>	<b>65,01</b>	<b>27.992.000,00</b>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	80.000.000,00	52.008.000,00	65,01	27.992.000,00
	<b>17.658.917.960,00</b>	<b>15.418.905.691,00</b>	<b>87,32</b>	<b>2.240.012.269,00</b>
<b>Kelurahan Jatimurni</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>30.808.000,00</b>	<b>88,02</b>	<b>4.192.000,00</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>30.808.000,00</b>	<b>88,02</b>	<b>4.192.000,00</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	35.000.000,00	30.808.000,00	88,02	4.192.000,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>1.633.763.800,00</b>	<b>1.623.178.400,00</b>	<b>99,35</b>	<b>10.585.400,00</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.558.763.800,00</b>	<b>1.551.413.400,00</b>	<b>99,53</b>	<b>7.350.400,00</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.358.763.800,00	1.351.413.400,00	99,46	7.350.400,00
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>71.765.000,00</b>	<b>95,69</b>	<b>3.235.000,00</b>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35.000.000,00	31.765.000,00	90,76	3.235.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.668.763.800,00</b>	<b>1.653.986.400,00</b>	<b>99,11</b>	<b>14.777.400,00</b>
<b>Kelurahan Jatirahayu</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>27.688.000,00</b>	<b>55,38</b>	<b>22.312.000,00</b>



**LKIP**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>27.688.000,00</b>	<b>55,38</b>	<b>22.312.000,00</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	27.688.000,00	55,38	22.312.000,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>2.812.569.000,00</b>	<b>2.756.725.200,00</b>	<b>98,01</b>	<b>55.843.800,00</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.752.569.000,00</b>	<b>2.703.795.200,00</b>	<b>98,23</b>	<b>48.773.800,00</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.552.569.000,00	2.503.795.200,00	98,09	48.773.800,00
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>52.930.000,00</b>	<b>88,22</b>	<b>7.070.000,00</b>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.000.000,00	17.930.000,00	89,65	2.070.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.862.569.000,00</b>	<b>2.784.413.200,00</b>	<b>97,27</b>	<b>78.155.800,00</b>
<b>Kelurahan jatiwarna</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>116.541.000,00</b>	<b>97,12</b>	<b>3.459.000,00</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>116.541.000,00</b>	<b>97,12</b>	<b>3.459.000,00</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120.000.000,00	116.541.000,00	97,12	3.459.000,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>1.628.360.800,00</b>	<b>1.626.314.000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>2.046.800,00</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.568.360.800,00</b>	<b>1.566.826.000,00</b>	<b>99,9</b>	<b>1.534.800,00</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.168.360.800,00	1.166.826.000,00	99,87	1.534.800,00
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>59.488.000,00</b>	<b>99,15</b>	<b>512.000,00</b>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.000.000,00	19.488.000,00	97,44	512.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.748.360.800,00</b>	<b>1.742.855.000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>5.505.800,00</b>
<b>Kelurahan Jatimelati</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.002.500,00</b>	<b>94,01</b>	<b>2.997.500,00</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.002.500,00</b>	<b>94,01</b>	<b>2.997.500,00</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	47.002.500,00	94,01	2.997.500,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>1.741.740.800,00</b>	<b>1.717.999.150,00</b>	<b>98,64</b>	<b>23.741.650,00</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.681.740.800,00</b>	<b>1.658.190.400,00</b>	<b>91,41</b>	<b>23.550.400,00</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.481.740.800,00	1.458.190.400,00	98,41	23.550.400,00
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>59.808.750,00</b>	<b>99,68</b>	<b>191.250,00</b>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.000.000,00	19.808.750,00	99,04	191.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.791.740.800,00</b>	<b>1.613.835.150,00</b>	<b>90,07</b>	<b>177.905.650,00</b>

Sumber : Realisasi Aplikasi SIMDA Kota Bekasi Tahun 2024, diolah



**LKIP**

Tahun 2024, Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi memperoleh anggaran sebesar Rp. 25.730.352.360,00,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.533.350.735,00,-. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar 95,35%. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 4,88% setara dengan Rp 1.197.001.625,00. Perbandingan realisasi anggaran dengan Tahun sebelumnya bisa dilihat dibawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pondokmelati**  
**Kota Bekasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.399.968.200	14.856.653.443	90,58	16.613.917.960,00	15.765.303.485,00	94,90
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	150.000.000	131.306.000	87,53	885.000.000,00	819.318.500,00	92,58
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.373.027.400	6.310.118.994	85,58	8.206.434.400,00	7.953.138.750,00	96,91
4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50.000.000	23.436.000	46,87	365.000.000,00	311.498.000,00	85,30
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	37.220.000	74,44	80.000.000,00	52.008.000,00	65
	<b>Total</b>	<b>24.088.995.600</b>	<b>21.358.734.437</b>	<b>88,60</b>	<b>25.730.352.360</b>	<b>24.533.350.735</b>	<b>95,35</b>

Sumber : Aplikasi SIMDA Keuangan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2023 dan 2024, diolah



# **Bab IV** **Penutup**



## **BAB 4 PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada tahun 2024, Kecamatan Pondokmelati berhasil merealisasikan seluruh target kinerja yang telah direncanakan. Capaian ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis SAKIP, serta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen aparatur Kecamatan Pondokmelati dalam melaksanakan program secara transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam optimalisasi digitalisasi pelayanan, pengembangan SDM, dan pengawasan pelaksanaan proyek agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan.

Untuk tahun 2025, Kecamatan Pondokmelati akan fokus pada penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih terintegrasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder. Rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian positif, sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan wilayah.

### **B. Rencana Tindak**

#### **1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**

- **Evaluasi dan Penyempurnaan SAKIP:**
  - Melakukan audit kinerja internal secara berkala untuk memastikan keselarasan antara rencana strategis dan implementasi kegiatan.
  - Mengembangkan indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan kebutuhan lokal.



- **Peningkatan Kompetensi Aparatur:**
  - Mengadakan pelatihan manajemen kinerja berbasis teknologi dan inovasi pelayanan publik.
  - Memberikan pelatihan kepada aparatur tentang pengelolaan data berbasis SAKIP.
- 2. **Digitalisasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik**
  - Mengembangkan sistem layanan berbasis aplikasi yang lebih terintegrasi, mencakup pelayanan administrasi, pengaduan masyarakat, dan informasi publik.
  - Menyediakan pusat layanan digital di setiap kelurahan untuk mendukung masyarakat yang kurang akses terhadap teknologi.
  - Memastikan pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur IT agar sistem pelayanan berjalan optimal.
- 3. **Penguatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan**
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan forum konsultasi publik.
  - Melibatkan Pokmas/Ormas secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya.
  - Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Pokmas/Ormas dalam mengelola program secara mandiri.
- 4. **Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**
  - Merancang pembangunan yang mengedepankan konsep ramah lingkungan, seperti pemanfaatan teknologi hemat energi dan bahan daur ulang.
  - Mengadakan pengawasan berkala pada proyek infrastruktur untuk menjamin kualitas dan kesesuaian dengan rencana.
  - Memprioritaskan infrastruktur strategis yang langsung mendukung kebutuhan masyarakat, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum.
- 5. **Kolaborasi dengan Stakeholder**
  - Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
  - Membentuk forum lintas sektor yang fokus pada pengembangan wilayah kecamatan secara terpadu.

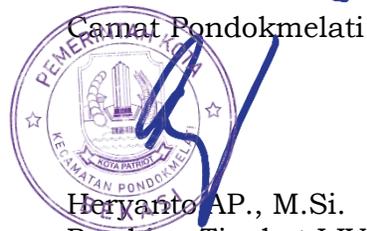


- o Menggalang komitmen bersama untuk mendorong inovasi di bidang pelayanan dan pembangunan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kecamatan Pondokmelati berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, pelayanan, dan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bekasi, Januari 2025

Camat Pondokmelati



Heryanto AP., M.Si.  
Pembina Tingkat I,IV/B  
NIP. 19750717199603 1 003.